



Dinas Komunikasi dan Informatika
KOMINFO JATENG



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025



+024 - 8319140



diskominfo.jatengprov.go.id



Jl. Menteri Supeno 1/2 Semarang

DAFTAR ISI

DAFTAR ISIi

DAFTAR GAMBAR.....ii

DAFTAR TABEL.....iii

DAFTAR BAGANiv

KATA PENGANTAR.....v

BAB I PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Isu-isu Strategis2

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran5

1.4 Sistematika Penulisan9

1.5 Langkah Perbaikan Rekomendasi Internal..... 11

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA13

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD..... 13

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 15

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025 17

2.4 Perjanjian Kinerja 19

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja..... 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA22

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 22

3.2 Realisasi Anggaran..... 35

3.3 INOVASI 35

3.4 PENGHARGAAN 37

BAB IV PENUTUP.....39

4.1 Kesimpulan 39

4.2 Rekomendasi 39

LAMPIRAN40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sarpras Diskominfo 2025	8
Gambar 2 Goverment Resource Management System	20
Gambar 3 Inovasi e-office Si Sekrup	36
Gambar 4 Jateng Ngopeni Nglakoni	37
Gambar 5 Penerimaan Penghargaan badan Publik Informatif Peringkat 4 Nasional	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pegawai berdasarkan status	12
Tabel 2 Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan	13
Tabel 3 Pegawai berdasarkan range usia	13
Tabel 4 Pegawai Berdasarkan Golongan dan Eselon	14
Tabel 5 Anggaran Tahun 2025	16
Tabel 6 Lankah Perbaikan dari Rekomendasi Internal	18
Tabel 7 Tindak Lanjut atas LHE SAKIP 2025	19
Tabel 8 Tujuan dan Sasaran	21
Tabel 9 Tujuan dan Sasaran Tahun 2025	22
Tabel 10 Perjanjian Kinerja	24
Tabel 11 Program dan Kegiatan	25
Tabel 12 Kategori Capaian Kinerja	29
Tabel 13 Capaian Kinerja Tahun 2025	30
Tabel 14 Perbandingan target dan realisasi kerja tahun 2025	31
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Beberapa tahun terakhir	33
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah Renstra	34
Tabel 17 Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan standar nasional	35
Tabel 18 Analisis Faktor Keberhasilan/Kegagalan	35
Tabel 19 Efisiensi Anggaran	36
Tabel 20 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan	38

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	14
Bagan 3 Domain SPBE	45

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai yang telah ditentukan. Terima kasih juga kepada rekan dan kolega yang telah membantu menyelesaikan penyusunan LKjIP ini.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2025 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah



Agung Hariyadi, S.E., M.M.
Pembina Utam Muda
NIP. 19701202 199003 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Pemerintah di seluruh dunia menghadapi tekanan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, mengurangi birokrasi, dan memberikan transparansi yang lebih baik kepada masyarakat, termasuk apa yang terjadi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu, solusi yang bisa digalakkan untuk meningkatkan efiseisn dan efektivitas pemerintah adalah transformasi digital pemerintahan.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pemerintahan. Teknologi seperti internet, cloud computing, big data, kecerdasan buatan (AI), dan blockchain menjadi elemen kunci dalam mendukung transformasi digital di pemerintahan,.

Digitalisasi memungkinkan pemerintah untuk mengotomatisasi proses administratif, mengintegrasikan data, dan meningkatkan akses informasi, hal ini sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat modern yang mengharapkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan mudah diakses, digitalisasi pemerintahan memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan publik secara online, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kenyamanan. Di sinilah peran dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Tengah sebagai perumus, fungsi koordinatif, pelaksana sekaligus monitoring pelaksanaan transformasi digital di Jawa Tengah.

Dalam rangka mendukung digitalisasi, Dinas Kominfo Prov. Jateng juga berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan terkait teknologi informasi dan komunikasi (TIK), hal ini penting untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem digital, akan tetapi teknologi itu seperti pedang yang bermata dua, dengan adanya digitalisasi, akan muncul tantangan baru terkait keamanan data dan privasi, sehingga Pemerintah harus memastikan bahwa data masyarakat yang dikumpulkan dan dikelola dilindungi dari ancaman seperti peretasan atau penyalahgunaan dan kejahatan lainnya, melalui beragam aksi.

Diharapkan digitalisasi pemerintahan tidak hanya memperbaiki pelayanan publik, tetapi juga mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan menciptakan peluang baru di sektor teknologi. Upaya dan progress aksi dalam digitalisasi di Jawa tengah, baik dalam sisi aplikasi, hardware jaringan, pengelolaan data, pengelolaan informasi dan konten maupun sisi keamanannya tidak hanya mampu memberikan warna dinamika teknologi, tetapi juga memajukan daerah serta memfasilitasi masyarakat Jawa Tengah agar maju dan semakin sejahtera.

1.2 Isu-isu Strategis

- 1) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sebagai Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan. SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB), merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dengan pengelolaan SPBE dapat mendukung transformasi digital terutama di sektor pemerintahan. Implementasi transformasi digital pada Diskominfo terdapat pada 4 bidang fasilitasi, yaitu: infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Pengembangan layanan publik dengan SPBE menjadi salah satu fokus kegiatan dalam menyukseskan 10 Program Prioritas Daerah, dimana SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Adapun beberapa bentuk kegiatan pengembangan SPBE di Jawa Tengah yaitu melalui:
 - a. Pengembangan sistem informasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan;
 - b. Sistem tata naskah dinas elektronik (e-office);

- c. Sistem pelayanan kepegawaian terpadu;
- d. Sistem pelayanan masyarakat terintegrasi;
- e. Sistem pelayanan pengaduan, dan didukung penguatan keamanan sistem informasi;
- f. Kebijakan yang mewajibkan setiap perangkat daerah untuk mengembangkan 1 (satu) inovasi pelayanan publik dalam 1 (satu) tahun. II-15

- 2) Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Suatu Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel. Pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik saat ini menjadi suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan. Dengan adanya keterbukaan, diharapkan proses kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik dapat dilakukan secara transparan. Sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan good governance yakni Badan Publik dapat menjalankan praktik praktik usaha yang sehat, serta menjalankan kegiatan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan yang berarti bagi masyarakat luas. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Utama selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PPID Pembantu di lingkup Provinsi Jawa Tengah agar senantiasa mempublikasikan informasi yang dimiliki di setiap badan publik kepada masyarakat melalui berbagai media yang dimiliki Badan Publik. Disamping mempublikasikan informasi kepada masyarakat, Badan Publik juga dituntut untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi dengan menyiapkan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID).
- 3) Pengelolaan Data Terpadu dan Terintegrasi Sebagai Embrio Big Data Pemerintahan. Meskipun pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur teknologi sudah begitu cepat, seringkali masih ditemui adanya gap yang terjadi antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. dengan hal ini terjadi karena data yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan seringkali kurang akurat, relevan dan uptodate. Sehingga dibutuhkan suatu pengelolaan data yang terpadu, akurat dan uptodate melalui Satu Data Jawa Tengah. Penyelenggaraan Satu Data Jawa Tengah perlu ditingkatkan agar pada akhirnya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal dengan memulai inisiasi pengelolaan Big Data dimana data yang dibutuhkan sangat besar, bervariasi dan selalu realtime. Pemprov Jawa

Tengah merencanakan penggunaan Big Data untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat sehingga pelayanan publik kepada masyarakat lebih maksimal ke depannya.

- 4) Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Yang Bertujuan Membangkitkan Potensi Masyarakat di Jawa Tengah. Dengan supporting Teknologi Informasi diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi yang telah terbangun sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kapasitas masyarakat di Jawa Tengah khususnya dalam menggali potensi ekonomi demi kesejahteraan.
- 5) Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik semakin menguatkan bahwa urusan persandian yang berada di bawah pembinaan Badan Siber dan Sandi Negara memiliki tanggung jawab untuk mengamankan penyelenggaraan SPBE. Demikian juga pembentukan ekosistem Jawa Tengah Smart Province dimana pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting harus didukung dengan sistem keamanan informasi yang baik. Pengamanan informasi harus mampu mengikuti perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat sehingga mendukung peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah telah merencanakan II-17 Making Indonesia 4.0 yang bertujuan menghasilkan kualitas output yang lebih tinggi di sektor industri dengan integrasi antara konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam 10 Prioritas Nasional Making Indonesia 4.0 terdapat beberapa layer diantaranya: wearable tech, advance robotic, 3D printing, AI, dan IoT. Taktik dan strategi keamanan siber yang efektif sangat diperlukan sebab Indonesia menjadi negara nomor 3 yang paling rentan terhadap malware. Baik individu maupun organisasi dapat memulai kesadaran akan keamanan siber. Keamanan siber harus menjadi bagian dari perencanaan transformasi digital Indonesia. Mewujudkan kesadaran akan keamanan siber dapat dimulai dari diri sendiri. Hal yang paling sederhana adalah dengan memahami pemanfaatan IoT di sekitar untuk menjamin keamanan dari data dan privasi dunia maya sehingga perlindungan data pribadi juga dilaksanakan oleh para aparatur pemerintah daerah dan masyarakatnya serta juga oleh para penyelenggara sistem elektronik yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi yang ada di dalamnya.
- 6) Peningkatan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Digital Perlu diakui bahwa di Indonesia, talenta digital yang menguasai pengelolaan

teknologi informasi masih sangat minim. Kementerian Kominfo berupaya untuk mentransformasi kapasitas sumber daya manusia yang ada dengan mengadakan berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan kapasitas talenta digital. Sejalan dengan hal tersebut peningkatan kapasitas SDM digital mejadi prioritas dalam pembangunan Jawa Tengah baik dari segi pengelola teknologi informasi, komunikasi, data dan keamanan informasi.

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran sebagai berikut:

1.3.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya manusia sebanyak 221 orang (ASN dan non ASN) dan ditambah dengan 28 outsource. Sebagai gambaran detail kapasitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada akhir tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

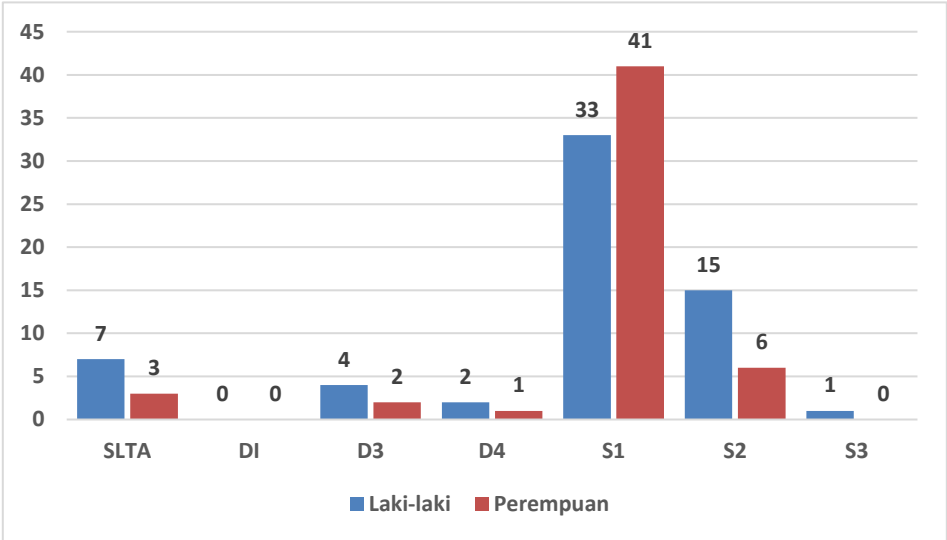
Tabel 1 Jumlah Pegawai berdasarkan status

Unit Kerja	PNS		PPPK		Non ASN		Out sourc		Grand Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	
SEKRETARIAT	8	15	4	5	18	3	17	3	73
BIDANG IKP	7	7	3	4	16	6	-	-	43
BIDANG STATISTIK	7	6	1	-	11	3	1	-	29
BIDANG TIK	10	4	-	1	6	2	7	-	30
BIDANG E-GOV	7	6	5	-	19	10	-	-	47
BIDANG PDKI	11	3	1	-	10	2	-	-	27
Grand Total	50	41	14	10	80	26	25	3	249

Tabel 2 Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

No	Bidang	Pendidikan ASN dan Non ASN (tanpa outsourcing)											
		S3		S2		S1		D-IV		D3		SLTA	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretariat	1	-	2	3	14	17	1	-	1	3	10	-
2	IKP	-	-	3	1	22	14	-	-	1	1	1	-
3	Statistik	-	-	3	-	12	8	-	-	-	1	4	1
4	TIK	-	-	1	-	14	5	-	2	1	-	-	-
5	E-Government	-	-	2	2	28	14	-	-	1	-	-	-
6	Persandian	-	-	3	-	7	5	1	-	3	-	8	-

No	Bidang	Pendidikan ASN dan Non ASN (tanpa outsourcing)											
		S3		S2		S1		D-IV		D3		SLTA	
	Sub Jumlah	1		14	6	113	78	4	1	6	4	29	4
	Total	1		20		160		4		12		24	
		221 (ASN dan Non ASN)											



Bagan 1 Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 3 Pegawai berdasarkan range usia

UNIT KERJA	RANGE USIA ASN dan NON ASN								JUMLA H
	20-30		31-40		41-50		51-60		
	L	P	L	P	L	P	L	P	
SEKRETARIAT	4	5	12	3	8	9	6	6	53
BIDANG IKP	6	8	12	6	5	3	3		43
BIDANG STATISTIK	10	2	2	5	4	2	3		28
BIDANG TIK	4	3	9	2	3	2			23
BIDANG E-GOV	8	8	17	6	5	1	1	1	47
BIDANG PDKI	7	1	7	2	5		3	2	27
	39	27	59	24	30	17	16	9	221

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH	INSTANSI PEMBINA
1	PRANATA KOMPUTER	32 ORANG	BPS
2	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	16 ORANG	KEMENKOMDIGI
3	SANDIMAN	4 ORANG	BSSN
4	MANGGALA INFORMATIKA	1 ORANG	BSSN
5	STATISTISI	7 ORANG	BPS
6	SURVEYOR PEMETAAN	1 ORANG	BMKG
7	ANALIS SDM APARATUR	2 ORANG	BKN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH	INSTANSI PEMBINA
8	ARSIPARIS	2 ORANG	ANRI
9	PERENCANA	1 ORANG	BAPPENAS
	JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL	66 ORANG	
10	PELAKSANA UMUM	42 ORANG	
11	STRUKTURAL	10 ORANG	

Tabel 4 Pegawai Berdasarkan Golongan dan Eselon

N o	Bidang	PNS												Jumlah
		Sekret		IKP		Statistik		TIK		E-Gov		Persandia n		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	II / c	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
2	II / d	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
3	III / a	-	-	-	2	1	1	3	2	4	1	2	1	17
4	III / b	2	1	1	-	-	1	1	1	-	2	2	-	11
5	III / c	2	3	1	-	-	2	3	-	-	1	-	-	12
6	III / d	3	8	3	4	4	2	2	1	1	2	4	1	35
7	IV / a	1	2	1	-	1	-	-	-	1		2	1	9
8	IV / b	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3
9	IV / c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Sub Total													91
		PPPK												
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
10	Kelas V	1												1
11	Kelas VII	1						1						2
12	Kelas IX	2		1		1		1		1		1		7
	Lain													
	II / a	1												1
	II / c		1						1					2
	III / a	1	1	3	2	1		1		2	1	1		13
Sub Jumlah														24
Total														115
1	Eselon IV	2		2										4
2	Eselon III			1		1		1		1		1		5
3	Eselon II	1												1
Sub Jumlah														10

1.3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan aspek yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi, tersebut meliputi ruang dan peralatan kerja, serta sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana sudah cukup memadai, namun peningkatan prasarana dan sarana masih perlu dilakukan guna meningkatkan serta mengoptimalkan kinerja

1.3.2.1 Aset Bangunan Tersertifikat (Kantor Diskominfo dan KI Jateng)



Gambar 1 Sarpras Diskominfo 2025

1.3.2.2 Transportasi

Kendaraan roda 2 sebanyak 4 (Empat) Unit, kendaraan roda 3 sebanyak 1 (Satu) Unit, kendaraan roda 4 sebanyak 30 (Tiga Puluh) Unit.

1.3.2.3 Ruang Rapat

Ruang pertemuan Dinas Kominfo meliputi Ruang Literasi Lantai 1, Ruang Podcast, Ruang Meeting Kecil, Ruang Rapat Aplikasi Lantai 4, Ruang Rapat Fiber Optik Lantai 4, dan Ruang Rapat Dharma Wanita, Ruang Briefing.

1.3.3 Anggaran Tahun 2025

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah didukung dengan anggaran sebesar Rp. 98.660.313.000,- yang teralokasi di masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5 Anggaran Tahun 2025

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
	DISKOMINFO	98.660.313.000
1	SEKRETARIAT	28.140.911.000
2	IKP	22.354.117.000
3	TIK	24,736,942,000
4	EGOV	18,060,461,000
5	STATISTIK	2,915,952,000
6	PDKI	2,451,930,000

1.4 Sistematika Penulisan

1) BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

2) BAB 2 Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Mulai dari tujuan, sasaran, strategi, perjanjian kinerja dan instrumen pendukung.

3) BAB 3 Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4) BAB 4 Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

1.5 Langkah Perbaikan Rekomendasi Internal

Tabel 6 Lankah Perbaikan dari Rekomendasi Internal

No	Rekomendasi	Langkah Perbaikan
1.	Mengidentifikasi desa yang ada di Jawa Tengah, terkait program Internet Desa bagi desa blankspot, Kemiskinan ekstrem, wisata, dan pendidikan;	Telah dilakukan koordinasi dengan Dispermasdes, Disporapar, Disdik dan bekerjasama dengan ISP untuk memetakan desa blankspot, PKE, wisata dan Pendidikan
2.	Melakukan kerjasama yang lebih intensif dengan penyelenggara pelatihan baik dari pusat, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan lembaga pelatihan swasta, khususnya untuk pelatihan teknis terkait teknologi informasi, perencanaan, kepegawaian serta pelatihan untuk mendukung peningkatan layanan Pusat Data Jawa Tengah dan Big Data Jawa Tengah;	Kerjasama telah dilaksanakan dengan pusat, BPSDMD Provinsi jawa Tengah, dan lembaga pelatihan swasta termasuk pelaksanaan program Government Transformation Academy (GTA) BPSDM KEMENKOMINFO
3.	Melakukan validasi data dan metadata terkait data sektoral yang masuk pada portaldata terutama untuk satu data indonesia sesuai regulasi yang berlaku serta untuk dapat dimanfaatkan sebagai data source dalam pembangunan Big Data Jawa Tengah;	Validasi data dilakukan melalui forum FGD/Workshop antara lain Forum Data di Bidang Statistik
4.	Melaksanakan IT Assessment dan Self Assessment serta melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengamanan informasi (Indeks KAMI), serta penyelenggaraan operasional persandian;	Telah dilakukan penilaian mandiri dan Data Center telah mendapatkan sertifikasi ISO 270001 SMKI
5.	Meningkatkan IT asesment, penetration test (PENTEST), dan implementasi sertifikat elektronik;	IT asesment dilaksanakan setiap tahun sedangkan PENTEST dan serifikat elektronik dilaksanakan tergantung dari request / permintaan OPD

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025

Menindaklanjuti Surat edaran Insperktorat Prov. Jateng nomor 700/861/W.I./2025 tentang Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, maka kami sampaikan tindak lanjut saran perbaikan laporan hasil evaluasi sebagai berikut :

Tabel 7 Tindak Lanjut atas LHE SAKIP 2025

NO	SARAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT YANG SUDAH DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2025	DATA DUKUNG
1.	Memanfaatkan Pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward/penghargaan kepada pegawai berprestasi atau sub unit kerja yang berkinerja baik, didukung dengan juknis/kriteria yang jelas, adanya tim penilai yang ditetapkan oleh Kepala Dinas	Sudah memberikan apresiasi kepada sub unit kerja yang berkinerja baik selama tahun 2025 dan telah melaksanakan Pemilihan Pegawai Terbaik Tahun 2025 di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah melalui Rapat Seleksi Pemilihan Pegawai Terbaik.	https://drive.google.com/drive/folders/1gstgDGg3eiVrltseeK8l6vnVK5ksrTeO?usp=sharing
2.	Menyampaikan dokumen LkjIP tahun berjalan kepada Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah secara tepat waktu/sesuai batas waktu yang ditetapkan.	Telah menyampaikan dokumen LkjIP Diskominfo Tahun 2025 kepada Biro Organisasi pada tanggal 27 Februari 2026	https://drive.google.com/file/d/1beSfg_pM-LElSH8kWgyFILJkbk-HYpsl/view?usp=sharing

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 berakhir bersamaan dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di tahun 2023 menyebabkan tidak adanya visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025-2026, maka perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah, termasuk pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2026 dilakukan berdasarkan isu strategis daerah aktual..

Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yang ingin diwujudkan dalam tiga tahun kedepan adalah **“Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Lestari”** dan merupakan mandat dari tujuan pembangunan jangka panjang Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJPD dalam penyampaian tujuan daerah, dengan sasaran daerah yang akan diwujudkan, yaitu: Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan; Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif; Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis. Tata kelola pemerintahan yang dinamis ini akan dapat terwujud dengan memperkuat pemerintahan yang adaptif dan birokrasi yang kolaboratif. Salah satunya melalui digitalisasi pemerintahan serta perluasan jejaring dan sinergi kerjasama dengan para stakeholder di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan leading sector yaitu Diskominfo, yang telah menyusun 4 rencana aktivitas strategis pada Tahun 2025- 2026 meliputi :

1. Melakukan penguatan ketersediaan dan pengelolaan infrastruktur TIK;
2. Mengoptimalkan layanan pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi;
3. Penyiapan SDM yang berkompeten dalam pengelolaan digitalisasi;
4. Menerapkan keamanan informasi dalam rangka pencapaian target Indeks KAMI (Keamanan Informasi)

Adapun dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi tersebut, diterjemahkan oleh Dinas Kominfo melalui tujuan dan sasaran OPD, yaitu:

Tabel 8 Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE	3,07	3,39	3,77
		1. Meningkatnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	1) Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Bobot 13%).	3	3,60	3,90
			2) Indeks Domain Tata Kelola SPBE (Bobot 25%).	2,8	3,20	3,50
			3) Indeks Domain Manajemen SPBE (Bobot 16,5%)	2	2,36	2,64
			4) Indeks Domain Layanan SPBE (Bobot 45,5%).	3,26	3,81	4,30
			5) Tingkat Pengelolaan Informasi Publik yang Handal, Tepat, Cepat dan Terpercaya	100	100	100
		2. Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral dan geospasial.	Laju Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dan Geospasial Pembangunan Daerah	32	64	100
		3. Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah digital Jawa Tengah.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI).	3+ (636)	3+ (638)	3+ (640)
2.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika		Indek Reformasi Birokrasi (RB)	68	68,3	72
		1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	79	80

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
				2024	2025	2026
	Provinsi Jawa Tengah	dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.				
		2. Meningkatnya Manajemen Resiko Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Indeks Manajemen Risiko	2,6	3,01	3,02

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai. Rumusan strategi yang disusun bersifat operasional, dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan perangkat daerah yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik atau fokus, konkrit dan operasional. Strategi dan kebijakan Diskominfo yang disusun merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tabel.

Tabel 9 Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Angka	3,07
		1. Meningkatnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	1) Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Bobot 13%).	Angka	3
			2) Indeks Domain Tata Kelola SPBE (Bobot 25%).	Angka	2,8
			3) Indeks Domain	Angka	2

			Manajemen SPBE (Bobot 16,5%)		
			4) Indeks Domain Layanan SPBE (Bobot 45,5%).	Angka	3,26
			5) Tingkat Pengelolaan Informasi Publik yang Handal, Tepat, Cepat dan Terpercaya	%	100
		2. Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral dan geospasial.	Laju Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dan Geospasial Pembangunan Daerah	%	32
		3. Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah digital Jawa Tengah.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI).	Angka	3+ (636)
2. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah			Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Angka	68
		3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	78
		4. Meningkatnya Manajemen Resiko Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,6

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel 10 Program dan Kegiatan

N o	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t	Anggaran
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Prinsip Manajemen Keamanan Informasi sejumlah 80%	%	50	2.451.930.000
1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Ketersediaan Layanan yang Menerapkan Prinsip SMKI dan sumber daya pendukung yang memadai	%	40	1.083.631.000
2	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Jaring Komunkasi Sandi	%	25	1.368.299.0000
B	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	74	24.763.942.000
1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Domain dan SubDomain yang Aktif	Angka	1	12.714.319.000
2	Kegiatan Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi layanan Pusat Data	OPD	50	11.609.495.000
3	Kegiatan Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah regulasi/SOP layanan Infrastruktur TIK	Dokume n	2	404.128.000
C	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi	%	47	18.060.461.000
1	Kegiatan Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Dokumen Tata Kelola e- Government yang diterbitkan	%	65	197.808.000
2	Kegiatan Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Aplikasi Umum yang Terkelola		48	17.659.305.000
3	Kegiatan Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem e-Government yang terintegrasi		50	203.348.000
D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik	Angka	81	23.838.273.000

N o	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t	Anggaran
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum	Dokume n	260	8.232.617.000
2	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan	Konten	260	8.730.602.000
3	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan	Kelompo k	91	6.875.054.000
E	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	33	2.038.869.000
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Badan Publik yang Terbuka (Informatif)	OPD	76	2.038.869.000
F	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyusunan Data Prioritas Pembangunan Daerah	%	48	877.083.000
1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Big Data	%	48	631.685.000
2	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Data Statistik dan Geospasial yang Tervalidasi	%	60	245.398.000

2.4 Perjanjian Kinerja

Target kinerja individu dalam rangka reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang disepakati dan menjadi tanggung jawab instansi kepada Pimpinan Daerah terhadap capaiannya sebagaimana tabel

Tabel 11 Perjanjian Kinerja

N o	Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satua n	Targe t
1.	Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Angka	3,07
		1. Meningkatkan layanan dan tata kelola teknologi	1) Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Bobot 13%).	Angka	3
		informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	2) Indeks Domain Tata Kelola SPBE (Bobot 25%).	Angka	2,8
			3) Indeks Domain Manajemen SPBE (Bobot 16,5%)	Angka	2
			4) Indeks Domain Layanan SPBE (Bobot 45,5%).	Angka	3,26
			5) Tingkat Pengelolaan Informasi Publik yang Handal, Tepat, Cepat dan Terpercaya	%	100
		2. Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral dan geospasial.	Laju Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dan Geospasial Pembangunan Daerah	%	32
		3. Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah digital Jawa Tengah.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI).	Angka	3+ (636)
2.	Meningkatkan Kualitas		Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Angka	68

N o	Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Targe t
	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	78
	Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	2. Meningkatnya Manajemen Resiko Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,6

2.5Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam mendukung penerapan Capaian Kinerja terdapat instrument-instrumen pendukung akan pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. GRMS (Goverment Resource Management System)



Gambar 2 Goverment Resource Management System

Bangunan sistem aplikasi terintegrasi pemerintah provinsi Jawa Tengah. Sistem aplikasi yang terdiri atas; sistem e-budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e- delivery, e-controlling, e-monev dan gph, serta aplikasi networking terdiri atas; system cloud server, video/audio streaming, DNSX filter, voip gateway server, nms, ap controller, the dude dan inventarisasi pun mulai diterapkan di Provinsi Jawa Tengah. Muara

dalam system ini adalah integrasi antar data didalam proses bisnis internal birokrasi yang notabene merupakan sistem pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan publik dan pembangunan sehingga tercipta monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi secara real-time.

2. SOP Layanan Pusat Data;

SOP layanan pusat data adalah standar operasional prosedur dalam memberikan layanan dalam pusat data

3. SOP Rekomtek;

SOP atau standar operasional prosedur dalam fasilitasi rekomendasi teknis dalam pengembangan aplikasi di Provinsi Jawa Tengah, baik aplikasi baru maupun pengembangan aplikasi lama.

4. SOP Fasilitasi Liputan;

SOP yaitu standar operasional prosedur dalam melayani permintaan liputan dan masuk dalam berita jatengprov.go.id

5. SOP Fasilitasi Streaming;

SOP yaitu standar operasional prosedur melayani permintaan streaming OPD yang melibatkan Pimpinan Daerah.

6. SOP Penyusunan LKjIP;

SOP yaitu standar operasional prosedur ini berisi mekanisme/tata cara/prosedur penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Diskominfo Prov. Jateng.

7. SOP Layanan Jaringan;

SOP yakni standar operasional prosedur berisi prosedur layanan bandwidth untuk mengatur ketersediaan bandwidth bagi OPD dan Stakeholder yang bermitra dengan Diskominfo Prov. Jateng.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 12 Kategori Capaian Kinerja

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	$\geq 91\%$	Sangat Tinggi
2	76 – 90,99 %	Tinggi
3	66 – 75,99%	Cukup
4	51 – 65,99%	Rendah
5	< 50,99%	Sangat Rendah

Capaian Indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan secara menyeluruh melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab dinas. Terdapat 2(dua) tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2025, yaitu :

- 1) Tujuan 1

a. Sasaran Strategis 1.1

: Meningkatkan layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

b. Sasaran Strategis 1.2

: Meningkatkan pelayanan data statistik sektoral dan geospasial

c. Sasaran Strategis 1.3

: Meningkatkan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah digital Jawa Tengah
- 2) Tujuan 2

a. Sasaran Strategis 2.1

: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

b. Sasaran Strategis 2.2

: Meningkatkan Manajemen Resiko Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah

Tabel 13 Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Angka	4,50	4,56	101,33	3,77
	1.1. Meningkatkan layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	1) Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Bobot 13%).	Angka	4,90	4,90	102,08	3,90
		2) Indeks Domain Tata Kelola SPBE (Bobot 25%).	Angka	4,10	4,70	114,63	3,50
		3) Indeks Domain Manajemen SPBE (Bobot 16,5%)	Angka	3,45	4,18	102,67	2,64
		4) Indeks Domain Layanan SPBE (Bobot 45,5%).	Angka	4,69	4,81	102,55	4,30
		5) Tingkat Pengelolaan Informasi Publik yang Handal, Tepat, Cepat dan Terpercaya	%	100	100	100	100
	1.2. Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral dan geospasial	Laju Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dan Geospasial Pembangunan Daerah	%	64	100	156,25	100
	1.3. Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan digital Jawa Tengah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	638	855	134,01	3+ (640)
2.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Angka	2,75	2,75	102,36	72

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	%	
	2.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79	86,25	109,17	80
	2.2. Meningkatkan Manajemen Resiko Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,75	2,335	100%	3,02

Mayoritas indikator melebihi target (>100%), hal ini menandakan kinerja yang baik dengan capaian tertinggi pada Nilai Kepuasan Masyarakat (109,17%) & Tata Kelola SPBE (114,63%) dan Pemanfaatan Data Statistik yang Tercapai (156%) al tersebut disebabkan oleh tingginya pemanfaatan data pada akhir tahun berjalan, meskipun capaian rata-rata melebihi target, tetapi perlu ada perbaikan terutama pada area Manajemen SPBE & Keamanan Informasi karena peningkatan capaian relatif kecil.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 dilakukan analisis lebih dalam sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 14 Perbandingan target dan realisasi kerja tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,50	4,56	101,33	Sangat Tinggi	Penilaian PAN RB
	1.1. Meningkatnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa	1) Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Bobot 13%).	4,90	4,90	102,08	Sangat Tinggi	Penilaian PAN RB
		2) Indeks Domain	4,10	4,70	114,63	Sangat	Penilaian PAN RB

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	Tengah.	Tata Kelola SPBE (Bobot 25%).				Tinggi	
		3) Indeks Domain Manajemen SPBE (Bobot 16,5%)	3,45	4,18	102,67	Sangat Tinggi	Penilaian PAN RB
		4) Indeks Domain Layanan SPBE (Bobot 45,5%).	4,69	4,81	102,55	Sangat Tinggi	Penilaian PAN RB
		5) Tingkat Pengelolaan Informasi Publik yang Handal, Tepat, Cepat dan terpercaya	100	100	100	Sangat Tinggi	Penilaian Mandiri
	1.2. Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral dan geospasial.	Laju Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dan Geospasial Pembangunan Daerah	64	100	156,25	Sangat Tinggi	eControl ling Kinerja
	1.3. Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah digital Jawa Tengah.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI).	638	855	134,01	Sangat Tinggi	BSSN
2.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	2,75	2,75	102,36	Sangat Tinggi	Inspektora t
	2.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	86,25	109,17	Sangat Tinggi	Penilaian Mandiri
	2.2 Meningkatnya Manajemen Resiko Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Indeks Manajemen Risiko	2,75	2,33	100%	Sangat Tinggi	Inspektora t

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (3 tahun);

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Kinerja Beberapa tahun terakhir

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Jawa Tengah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,27	3,98	121,71	3,33	4,26	127,93	4,27	4,42	103,51	4,50	4,56	101,33
1.1	Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	a. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	3,53	3,50	99,15	3,65	5	136,99	4,80	4,90	102,08	4,90	4,90	100
		b. Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3,83	3,70	96,61	3,95	3,90	98,73	3,90	4,20	107,69	4,10	4,90	119,51
		c. Indeks Domain Manajemen SPBE	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3,36	3,45	102,59	3,45	4,18	105,12
		d. Indeks Domain Layanan SPBE	4,17	4,62	110,79	4,30	4,75	110,47	4,63	4,75	102,59	4,69	4,93	105,12
		e. Tingkat Pengelolaan Informasi Publik yang Handal, Tepat, Cepat dan Terpercaya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
1.2	Termanfaatkan data dan informasi statistik sektoral.	Laju Pemanfaatan Data Sektoral	81,76	85,70	104,82	95,65	95,68	100,00	32	32	100,00	64	64	100
1.3	Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	2+	3+	100	3+	3+	100,00	636	637	100,16	638	855	134,01
2	Meningkatkan Tata Kelola Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	72,50	82,18	113,35	81,25	87,54	107,74	81,25	87,54	107,74	6,92	6,92	100
2.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	a. Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	72,50	81,83	113,87	81,25	87,54	107,74	81,25	87,54	107,74	79	86,25	109,17
		b. Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	72	81,47	113,15	81	81,75	100,93	81	81,75	100,93	2,75	2,75	100

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah Renstra

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	4,50	4,56	101,33
	1.1. Meningkatnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	1) Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Bobot 13%).	4,90	4,90	102,08
		2) Indeks Domain Tata Kelola SPBE (Bobot 25%).	4,10	4,70	114,63
		3) Indeks Domain Manajemen SPBE (Bobot 16,5%)	3,45	4,18	102,67
		4) Indeks Domain Layanan SPBE (Bobot 45,5%).	107,67	3,45	4,18
	5) Tingkat Pengelolaan Informasi Publik yang Handal, Tepat, Cepat dan Terpercaya	100	100	100	
	1.2. Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral dan geospasial.	Laju Pemanfaatan Data Statsitik Sektoral dan Geospasial Pembangunan Daerah	64	100	156,25
1.3. Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah digital Jawa Tengah.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI).	638	855	134,01	
2.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi (RB	2,75	2,75	102,36
	2.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	79	86,25	109,17
	2.2. Meningkatnya Manajemen Resiko Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Indeks Manajemen Risiko	2,75	2,75	100%

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 17 Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan standar nasional

N O	Tujuan / sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,56	3,23	141,18%

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Tabel 18 Analisis Faktor Keberhasilan/Kegagalan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,50	4,56	101,33	implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sudah dapat menggambarkan predikat MEMUASKAN dalam penerapan SPBE	Melakukan reviu terhadap dokumen pendukung Indikator yang ada pada SPBE dan memetakan penanggung jawab dari masing-masing indikator, serta koordinasi, sosialisasi dan desk pemenuhan data dukung
	1.1. Meningkatnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	1) Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Bobot 13%).	4,90	4,90	102,08		
		2) Indeks Domain Tata Kelola SPBE (Bobot 25%).	4,10	4,70	114,63		
		3) Indeks Domain Manajemen SPBE (Bobot 16,5%)	3,45	4,18	102,67		
		4) Indeks Domain Layanan SPBE (Bobot 45,5%).	107,67	3,45	4,18		
		5) Tingkat Pengelolaan Informasi Publik yang Handal, Tepat, Cepat dan Terpercaya	100	100	100		
	1.2. Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral dan geospasial.	Laju Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dan Geospasial Pembangunan Daerah	64	100	156,25		

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	1.3. Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan digital Jawa Tengah.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	638	855	134,01		
2.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	2,75	2,75	102,36		
	2.5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	86,25	109,17		
	2.6. Meningkatnya Manajemen Resiko Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Indeks Manajemen Risiko	2,75	2,75	100%		

6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel 19 Efisiensi Anggaran

N O	TUJUAN/SASAR AN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIEN SI
		TARG ET	REALISA SI	CAPAIA N	TARGET	REALISASI	CAPAIA N	
1	Meningkatka n kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	69,2	69,2	100	52.533.897.0 00	51.151.476.1 41	97%	3%
2	Meningkatka n Digitalisasi Tata Kelola Pemerintaha n indeks Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik (SPBE)	4,5	4,56	101,3 3	46.126.416.0 00	45.177.681.2 18	98%	2%

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 20 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	101,33				
	2.1. Meningkatnya layanan dan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	1) Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE (Bobot 13%).	102,08				
		2) Indeks Domain Tata Kelola SPBE (Bobot 25%).	114,63				
		3) Indeks Domain Manajemen SPBE (Bobot 16,5%)	102,67				
		4) Indeks Domain Layanan SPBE (Bobot 45,5%).	102,59				
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi	100	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Domain Dan Subdomain Yang Aktif	100	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah Yang Terfasilitasi Layanan Pusat Data	100	Menunjang

				Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Regulasi/Sop Layanan Infrastruktur Tik	100	Menunjang
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Terintegrasi	100	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Aplikasi Umum Yang Terkelola	100	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Dokumen Tata Kelola e-Government Yang Diterbitkan	100	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem e-Government Yang Terintegrasi	100	Menunjang
		5) Tingkat Pengelolaan Informasi Publik yang Handal, Tepat, Cepat dan Terpercaya	100				
				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik	113,72	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Komunitas Masyarakat Yang Dikoordinasikan	100	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Konten Informasi Publik Yang Disebarluaskan	100	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Analisis Berita Dan Pendapat Umum	103,84	Menunjang
				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Badan Publik Yang Terbuka (Informatif)	100	Menunjang
	2.2. Meningkatnya pelayanan data statistik sektoral dan geospasial.	Laju Pemanfaatan Data Statistik Sektoral dan Geospasial	156,25				

		Pembangunan Daerah					
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Penyusunan Data Prioritas Pembangunan Daerah	100	Menunjang
				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Data Statistik Dan Geospasial Yang Tervalidasi		
				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Big Data	141,67	Menunjang
	2.3. Meningkatnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah digital Jawa Tengah.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI).	134,01				
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Prinsip Manajemen Keamanan Informasi Sejumlah 80%	100	Menunjang
				Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatnya Ketersediaan Layanan Yang Menerapkan Prinsip Smki Dan Sumber Daya Pendukung Yang Memadai	100	Menunjang
				Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Jaring Komunkasi Sandi	100	Menunjang
2.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	2,75				
	2.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,25				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100	Menunjang

				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selama satu tahun anggaran	166,66	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan selama satu tahun anggaran	100	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran	100	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah yang disediakan sebagai penunjang urusan pemerintah daerah, selama satu tahun anggaran	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun oleh perangkat daerah, selama satu tahun anggaran	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara, selama satu tahun anggaran	100	Menunjang
	2.2. Meningkatnya Manajemen Resiko Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.	Indeks Manajemen Risiko.	84,73				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		100	Menunjang

				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100	Menunjang
--	--	--	--	--	---	-----	-----------

3.2 Realisasi Anggaran

N o	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.817.166.000	26.661.460.292	95.85
		323.745.000	322.729.300	99.69
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	22.354.117.000	22.146.390.179	99.07
		2.038.869.000	2.020.896.370	99.12
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	24.736.942.000	23.934.800.511	96.76
		18.060.461.000	17.941.048.851	99.34
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	877.083.000	874.174.142	99.67
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.451.930.000	2.427.657.714	99.01

3.3 INOVASI

Beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi ruang lingkup e office, layanan antar OPD dan layanan publik. Beberapa inovasi tersebut yaitu:

1. Sistem Integrasi Sekretariat dan Unsur Penunjang (SI SEKRUP)

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tidak hanya bertujuan untuk menghindari risiko kehilangan, namun juga penertiban penggunaan dan pemeliharaan yang terukur melalui aplikasi Si Sekrup, agar supaya nyekrup (nyambung) antara aset dan penggunaannya, dan SDM-nya di pemerintah. Siapa yang menggunakan (aset) akan ketahuan. aplikasi ini berbasis website dan merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya, yakni e-Morsip (Penomoran dan Arsip), kemudian ditambahkan menu peminjaman aset, diharapkan melalui aplikasi ini, penggunaan aset daerah, khususnya di Diskominfo Prov. Jateng menjadi lebih tertib dan terkontrol.



Gambar 3 Inovasi e-office Si Sekrup

2. Sinergi Menjaga Ruang Siber (SI MEGA RUBER)

Keamanan informasi menjadi tanggung jawab semua OPD. Untuk itu, harus selalu menjaga dan memperkuat aplikasi yang dimiliki, agar terhindar dari peretasan maupun kebocoran, termasuk aplikasi online yang kerap menasar website pemerintah. Selain itu, untuk menghindari masuknya gangguan itu, dibutuhkan tim siber yang bisa memahami bagaimana mencegah, mengantisipasi, dan menangani. Jika terjadi insiden semacam itu, bisa cepat merespons, sehingga butuh koordinasi atau membangun kapasitas (capacity building). Penanganan keamanan informasi atau insiden siber di Jateng tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tetapi butuh kolaborasi dan sinergi bersama sangat diperlukan, mengingat sistem informasi saling berhubungan.

3. Helpdesk Ticketing System (HTS)

Inovasi aplikasi sebagai penunjang kemudahan memberikan layanan Pusat Data Pemprov Jateng yang berisi sistem tiket permohonan layanan, aduan, dan reporting.

4. Internet Desa

Internet Desa merupakan salah satu program terobosan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam turut serta menghadirkan internet di pedesaan seluruh Jawa Tengah melalui Diskominfo Provinsi Jawa Tengah sebagai enabler Transformasi Digital. Adapun tujuan program internet desa yaitu memberikan kemudahan desa-desa di Jawa Tengah mempunyai akses Internet yang terjangkau serta cakupan fokus pada sektor pariwisata, layanan publik desa, peningkatan ekonomi kreatif dan manfaat Internet desa untuk promosi produk unggulan UMKM desa, pengembangan wisata desa, pelayanan publik cepat mudah murah.

5. Super App JNN

Super App JNN atau Jateng Ngopeni Nglakoni adalah gabungan dari integrasi aplikasi – aplikasi layanan yang ada di Pemprov. Jateng. Terdapat setidaknya 10-13 layanan yang telah terintegrasi dan bisa diakses masyarakat luas melalui aplikasi ini. Aplikasi ini juga bisa digunakan masyarakat sebagai layanan aduan dan terintegrasi dengan Call Centre 24 jam. Aplikasi bisa didapatkan melalui playstore android dan appstore iOS.



Gambar 4 Jateng Ngopeni Nglakoni

3.4 PENGHARGAAN

Penghargaan yang berhasil dicapai oleh Dinas Kominfo Prov Jateng selama tahun 2025, yaitu :

1. Peringkat ke-4 nasional Provinsi sebagai badan publik dengan kategori informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Pusat dengan skor 98.70.
2. Innovation Public Services Tahun 2025 sub kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ekonomi Rendah, yang diterima oleh Kadiskominfo Jateng, Agung Hariyadi.
3. Outstanding Public Service Innovation (OPSI) 2025: Pemprov Jateng melalui inovasi yang didukung Diskominfo meraih dua penghargaan OPSI dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 dari Kementerian PAN-RB untuk inovasi Hetero Space dan E-Va CENTIL (Electronic Validation Cara Cepat dan Akurat Jamin Lancarkan Klaim BPJS).
4. Public Impact Leadership (Anugerah Pikiran Rakyat Media Network 2025): Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meraih penghargaan *Public Impact Leadership* pada ajang Anugerah Pikiran Rakyat Media Network 2025 yang diselenggarakan di Bandung, Jumat (5/12/2025). Kepala Dinas Kominfo Jateng, Agung Hariyadi, hadir

mewakili untuk menerima penghargaan tersebut.



Gambar 5 Penerimaan Penghargaan badan Publik Informatif Peringkat 4 Nasional

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Keberhasilan program dan kegiatan Diskominfo Prov. Jawa Tengah secara terpadu dapat mendukung tercapainya tujuan Perangkat Daerah yaitu “Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan” sekaligus juga mewujudkan tujuan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 yaitu “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Trnasformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan” khususnya untuk sasaran keempat yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif Serta Stabilitas Pembangunan Daerah”. Dari beberapa kegiatan diatas maka dapat dikatakan bahwa kinerja internal Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng berjalan dengan baik.

4.2 Rekomendasi

Membangun daerah tidak hanya bisa dimulai dari perencanaan. Rencana akan berhasil mana didukung oleh semua pihak dan diimplementasikan dengan bijak. Pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik dapat tercapai sesuai visi dan misi, serta mendukung kebijakan program prioritas Gubernur Jawa Tengah dan kebijakan nasional, didasari pada konsep perencanaan yang matang dan implementasi yang baik. Ke depan guna untuk meningkatkan kinerja organisasi, setidaknya bukan hanya sumberdaya yang ditambah tetapi juga komitmen dan dukungan pimpinan daerah diperlukan untuk meningkatkan urusan komuikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian agar berjalan lebih baik. Secara riil yang perlu dilakukan yaitu:

- 1) Efisiensi penggunaan sumberdaya terutama anggaran;
- 2) Penataan kelembagaan menjadi lebih ke arah output kinerja, dengan membentuk kelompok kerja per urusan dan per bidang penangangan kerja.
- 3) Penguatan landasan kegiatan dengan Menyusun standar regulasi mulai dari peraturan daerah, peraturan kepala daerah hingga kepala dinas dan standar operasional dan standar pelayanan.
- 4) Memperkuat inovasi dan pengembangan bentuk aplikasi, pengelolaan jaringan, unsur penunjang dengan e-office, dalam rangka optimalisasi pemerintah digital.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Telepon 024-8319140, Faximile 024-8319328 Kode Pos 50243,
Surat Elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id, Laman : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Hariyadi, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K

Jabatan : Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Gubernur Jawa Tengah



Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K.

Pihak Pertama,
Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Tengah



Agung Hariyadi, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701202 199003 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
Tujuan			
1	Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,50 (Angka)
Sasaran			
1.1	Meningkatnya Layanan dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Tingkat Pengelolaan Informasi Publik yang Handal, Tepat, Cepat dan Terpercaya	100 (%)
		Indeks Domain Layanan SPBE	4,69 (Angka)
		Indeks Domain Manajemen SPBE	3,45 (Angka)
		Indeks Domain Kebijakan SPBE	4,90 (Angka)
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	4,10 (Angka)
1.2	Meningkatnya Pelayanan Data Statistik Sektoral dan Geospasial	Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah	64 (%)
1.3	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Digital Jawa Tengah	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	638 (Angka)
Tujuan			
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	69,2 (Angka)
Sasaran			
2.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	2,75 (Angka)
2.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	79 (Angka)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 28.140.911.000,-	APBDP
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 24.392.986.000,-	APBDP
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 42.797.403.000,-	APBDP
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 877.083.000,-	APBDP
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 2.451.930.000,-	APBDP

Semarang, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Gubernur Jawa Tengah



Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K.

Pihak Pertama,
Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Tengah



Agung Hariyadi, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701202 199003 1 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN : 2025

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Tujuan 1		
Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,39
Sasaran		
1.1. Meningkatnya Layanan dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1. Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	3.60
	2. Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3.20
	3. Indeks Domain Manajemen SPBE	2.36
	4. Indeks Domain Layanan SPBE	3.81
1.2. Meningkatnya Pelayanan Data Statistik Sektor dan Geospasial	Laju Pemanfaatan Data Statistik Sektor dan Geospasial Pembangunan Daerah	64
1.3. Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Digital Jawa Tengah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	3
Tujuan 2		
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	70
Sasaran		
2.1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	79
2.2. Meningkatnya Manajemen Risiko Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Nilai MRI Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	3.01

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 PROVINSI JAWA TENGAH

RIENA RETNANINGRUM, SH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19641026 198909 2 001